

GLOBALISASI DAN PENGEMBANGAN KULTUR PESANTREN DI BANGKA BELITUNG

Oleh: H.Hatamar Rasyid

Guru Besar Ilmu Politik/Direktur Pascasarjana STAIN SAS BABEL

Abstract: *During this mode of schools identified with the culture of traditionalism, should at least be understood in two different ways. On one side of this traditionalism refers to a system rooted teachings of conspiracy marriage between theology skolatisisme Asy'ariyah with Maturidiyah with the teachings of Sufism (Islamic mysticism) which has been developed in Indonesia. While on the other side of traditionalism in teaching methodology (education) is applied in the world of pesantren (literacy salafiyah). The mention in the context of traditional teaching because in this case the pattern of teaching that monologues, not on Dialogic-emancipatory. The status and role of kiai become very dominant in-santrinya indoctrinate the students with a teaching approach that is both classic like; bandongan, sorogan, the market and so forth. This paper aims to explore the developmental stages Ponpes in the era of globalization and how they survive in conditions that suppressed by foreign cultures.*

Keywords: *boarding school, Traditional, globalization.*

Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren dalam perjalanan sejarah kebangsaan memiliki kontribusi yang sangat besar, terutama dalam mempersiapkan generasi bangsa dalam pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu agama.¹

Dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina, mencerdaskan dan mengembangkan masyarakat disekelilingnya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik, tidak hanya karena keberadaannya yang sudah lama, tetapi juga kultur, metode dan jaringan yang ditetapkan oleh lembaga agama tersebut. Keunikan tersebut, Clifford Geertz (1981) menyebutnya sebagai subkultur masyarakat Indonesia (khususnya Jawa).² Menurut Nurcholish Madjid, secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna ke-Islaman, tetapi juga memuat makna keaslian Indonesia. Sebab cikal bakal lembaga yang dikenal pesantren dewasa ini sebenarnya sudah ada pada masa Hindu- Buddha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan meng-Islamkan.³

Pesantren bukanlah sekedar merupakan fenomena lokal ke-Jawaan (hanya terdapat di Jawa), akan tetapi merupakan fenomena yang juga terdapat diseluruh Nusantara. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan sejenis pesantren ini dapat ditemukan pula diluar pulau Jawa. Di Aceh disebut dengan *dayah*, di Minangkabau ia dinamakan *surau*. Berbagai penelitian mengatakan bahwa awal abad ke-16 pesantren merupakan pusat lembaga pendidikan Islam kedua setelah masjid.⁴ Setelah berabad-abad lamanya, pesantren semakin berkembang dan

¹Ainur Rofiq., *Profile Umum Beberapa Aspek Pendidikan Formal Yang Diselenggarakan oleh Pesantren*. Malang: FKIP, 2004 hal.267

²Clifford Geertz., *The Javanese Kyai: The Changing Role of Cultural Broker* dalam *Comparative Studies in Society and History* vol.2 no.2 Januari 1960 hal.75

³Yasmadi, *Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, cet. Ke 1. Jakarta: Ciputat press, 2002 hal 29

⁴Martin Van Bruinessen., *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung, Mizan, 1996 hal. 24.

jumlahnya mencapai ribuan. Menurut buku laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) pada tahun 1982, jumlah pesantren di Indonesia tercatat sebanyak 4.890 buah. Dalam rentang waktu selama 22 tahun kemudian (antara tahun 1982- 2004), jumlah pesantren semakin bertambah banyak sejalan dengan didirikannya pesantren-pesantren diberbagai pelosok tanah air, terutama pada masa orde reformasi hingga sekarang ini.⁵ *Indegenousitas* pesantren kontras berbeda dengan praktek pendidikan pada institusi pendidikan lainnya, sehingga dinamika sekaligus problematika yang muncul kemudian juga menampilkan watak yang khas dan eksotik.

Selama ini corak pesantren yang diidentikkan dengan kultur tradisionalisme, setidaknya harus dipahami dalam dua sisi yang berbeda. Disatu sisi tradisionalisme ini mengacu kepada satu sistem ajaran yang berakar dari perkawinan konspiratif antara teologi *skolatisisme* Asy'ariyah dengan Maturidiyah dengan ajaran-ajaran tasawuf (mistisisme Islam) yang telah lama berkembang di Indonesia.⁶ Sementara disisi yang lain tradisionalisme dalam metodologi pengajaran (pendidikan) diterapkan dalam dunia pesantren (*basalafiyah*). Penyebutan tradisional dalam konteks pengajaran dikarenakan dalam hal ini pola pengajarannya yang monologis, bukan pada dialogis-emansipatoris. Kedudukan dan peran kiai menjadi sangat dominan dalam mendoktrinasi para santri-santrinya dengan pendekatan pengajaran yang bersifat klasik seperti; *bandongan, sorogan, pasaran* dan lain sebagainya.⁷

⁵Faisal Ismail., *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Analisa Historis*. Cet keempat. Jakarta: Mitra Cendikia, 2004 hal.96

⁶Abdurrahman Wahid "kata pengantar" dalam Hiroko Horikosi., *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta L P3M, 1987 hal. 24

⁷Terlepas dari adanya keterikatan tradisionalisme dalam dunia pesantren tidak selamanya stagnan dalam perkembangannya. Hal ini dikarenakan dalam prinsip pesantren adalah *al muhafadzah 'ala al qadim al shalih, wa al akhdzu bi al jadid al ashlah*, yaitu tetap memegang tradisi yang positif, dan mengimbangi dengan mengambil hal-hal baru yang positif. Persoalan-persoalan yang berpautan dengan *civic values* akan bisa dibenahi melalui prinsip-prinsip yang dipegang pesantren selama ini dan tentunya dengan perombakan yang efektif, berdaya guna, serta mampu memberikan kesejajaran sebagai umat manusia (*al musawah bain al nas*). Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan, pengembangan pesantren harus terus didorong. Karena pengembangan pesantren tidak terlepas dari adanya kendala yang harus dihadapinya. Apalagi belakangan ini, dunia secara dinamis telah menunjukkan perkembangan dan perubahan secara cepat, yang tentunya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap dunia pesantren. Terdapat beberapa hal yang tengah

Oleh karena itu, tradisionalisme dalam dunia pesantren tidak perlu ditinggalkan, hanya saja perlu disinergikan dengan perkembangan dan modernitas zaman. Hal ini berangkat dari keyakinan masih perlunya keseimbangan antara keilmuan agama dan keilmuan umum serta yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan generasi-generasi yang mampu mengemban amanah sebagai seorang ulama-intelektual. Maka dari itu memadukan unsur-unsur tradisionalisme dan nilai-nilai modernitas dalam kehidupan pesantren menjadi suatu pilihan sejarah (*historical choice*) yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua khas Indonesia. Pesantren mejadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pencita ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai dimensi. Sebagai obyek studi pesantren telah melahirkan banyak doktor dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi, sosiologi, pendidikan, politik, agama dan lain sebagainya.

Pesantren salah satu wahana pendidikan di Indonesia yang paling unik. Disebut unik karena dalam pesantren terdapat tradisi pendidikan yang khas sehingga pesantren dapat tampil dengan warna tersendiri. Pesantren itu tumbuh dari bawah ke atas.⁸ Bukan sebaliknya tumbuh dari atas ke bawah (*bottom up bukan top down*) yang seringkali akan mengalami nasib seperti lembaga lainnya

dihadapi pesantren dalam melakukan pengembangannya, yaitu: **Pertama**, *image* pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tradisional, tidak modern, informal, dan bahkan teropiniikan sebagai lembaga yang melahirkan terorisme, telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meninggalkan dunia pesantren. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab sesegera mungkin oleh dunia pesantren dewasa ini. **Kedua**, sarana dan prasarana penunjang yang terlihat masih kurang memadai. Bukan saja dari segi infrastruktur bangunan yang harus segera di benahi, melainkan terdapat pula yang masih kekurangan ruangan pondok (asrama) sebagai tempat menetapnya santri. Selama ini, kehidupan pondok pesantren yang penuh kesederhanaan dan kebersahajaannya tampak masih memerlukan tingkat kesadaran dalam melaksanakan pola hidup yang bersih dan sehat yang didorong oleh penataan dan penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai. **Ketiga**, sumber daya manusia. Sekalipun sumber daya manusia dalam bidang keagamaan tidak dapat diragukan lagi, tetapi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan peranan pondok pesantren dalam bidang kehidupan sosial masyarakat, diperlukan perhatian yang serius. Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang manajemen kelembagaan, serta bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, mesti menjadi pertimbangan pesantren. Lihat penelitian Ahmad Kamaruzzaman Bastaman (et.al), *Dekonstruksi Paradigma Pesantren* dalam Amin Haedari (Ed). "Pesantren dan Peradaban Islam " .Diterbitkan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Diklat Kementerian Agama RI, tahun 2010.

⁸Hasyim Muzadi, *Pesantren Tantangan Modernisasi* dalam Hafidz "Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernisasi" Jurnal Kariman vol.1 nomor 01 tahun 2013 hal,47.

ketika berganti pimpinan akan terjadi pula perubahan, pengkerdilan bahkan gulung tikar. Abdurrahman Wahid (alm. Gus Dur) secara tegas mengatakan bahwa pesantren dalam kedudukannya sebagai lembaga yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat merupakan subkultur dari sekian kultur yang ada di negara Indonesia. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa batasan elementer, *Pertama*, pemisahan kehidupan dengan masyarakat yang lebih besar. *Kedua*, konsepsi-konsepsi yang khas. *Ketiga*, transmisi dan transformasi disiplin keilmuan.⁹

Kedudukan kultural dari pesantren yang dipandang relatif lebih kuat dalam mempengaruhi masyarakat sekitarnya menjadikan pesantren semakin memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi nilai-nilai yang dimilikinya ke dalam sikap hidup keseharian masyarakat, tanpa mengorbankan eksistensinya. Berdasarkan pemikiran tersebut, konsep pendidikan sebagai pembebasan yang saat ini menjadi isu sentral dunia, sejak semula telah dieksperimentasikan dalam banyak aspek kehidupan di pesantren. Teori dan aktualisasi tentang kemandirian sudah merupakan nafas yang mewarnai seluruh aktivitas dan gerak kehidupan insan-insan pesantren.

Pesantren menjadi pusat pembentukan dan penguatan karakter masyarakat muslim yang lokalistik. Suatu kenyataan bahkan tidak dapat dipungkiri adanya bahwa pesantrenlah yang telah menawarkan Pesantren menjadi pusat pembentukan dan penguatan karakter masyarakat muslim yang lokalistik. Oleh karena itu, kehidupan dalam pesantren adalah penekanan satu suasana bagaimana santri-santri itu dengan ilmu-ilmu agama yang diperolehnya dapat menempa diri untuk berdikari agar jangan menggantungkan seluruh aktivitas yang terkait dengan kehidupan dunia kepada orang lain, kecuali menggantungkan diri kepada Allah. Memang, pendidikan pesantren tidak menjanjikan semacam *promise of job*¹⁰. Walaupun demikian ternyata pesantren dengan sistem pendidikan yang dikelolanya, demikian menurut Nurcholis madjid, banyak

⁹Abdurrahman Wahid., *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*.Yogyakarta: LKIS, 2001 hal.viii

¹⁰Hasyim Muzadi, *op.cit.*, hal.ix cf. Karel A.Steenbrink., *Pesantren: Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1986 hal.22

menanggulangi timbulnya pengangguran yang setiap tahun semakin membengkak. Tradisi santri yang lulus dari pesantren cenderung berorientasi ke desa asalnya membantu pekerjaan orang tuanya, sebelum bisa berdikari. Mereka sedikit yang berminat tinggal di kota dan berharap menjadi pegawai negeri. Inilah salah satu bukti ketika suasana pesantren dan sistem pendidikannya belum tersentuh dan terlalu larut dengan cakar-cakar modernisasi yang terus mencabik-cabik secara perlahan-lahan terhadap eksistensi kehidupan manusia.

Dinamika perubahan demi perubahan dan seiring dengan laju perkembangan budaya masyarakat maka sebagian lembaga pendidikan pondok pesantren baik tempat, bentuk hingga substansi pendidikannya telah mengalami perubahan dari bentuknya yang semula untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Saat ini pondok pesantren tidak lagi sesederhana seperti apa yang digambarkan orang. Diakui atau tidak, ternyata sentuhan-sentuhan modernisasi dan *impact* dari globalisasi telah masuk pada seluruh relung-relung kehidupan dan senantiasa dirasakan dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali dengan lembaga pondok pesantren sebagai sub kultur yang selalu diidentikkan dengan bermacam kekolotan dan cap tradisional, seiring dengan perjalanan waktu setahap demi setahap telah memasuki proses modernisasi. Citra diri pesantren yang mempertahankan status quo sebagian besar mulai bergeser secara pelan-pelan tapi pasti. Terhitung sejak Mukti Ali – sewaktu menjabat menteri agama tahun 70-an mencurahkan perhatiannya ke arah dinamisasi pondok pesantren, banyak para ahli berperan aktif serta memberikan kontribusi pemikirannya pada pondok pesantren. Kontribusi pemikiran-pemikiran itu gencar dilakukan hingga era reformasi.¹¹ Gambaran di atas merupakan fenomena yang umum terjadi pada semua pondok pesantren—pengecualian tentu saja pada pondok-pondok pesantren moderen—yaitu senantiasa berhadapan dengan perkembangan dunia baik modernisasi maupun globalisasi dengan berbagai dampaknya.

Makalah ini tidak berpretensi untuk menjelaskan secara umum dinamika pondok pesantren di tengah arus globalisasi yang masih berlangsung di beberapa dekade ini, tetapi hanya memberikan gambaran tentang adanya

¹¹Mahbub Junaidi, *Kolom Demi Kolom*. Jakarta: CV. H.Masagung, 1989 hal.9

Continuity and change, (kesinambungan dan perubahan) di dalam pendidikan pondok pesantren, terutama di dalam Pengembangan Kultur Pondok Pesantren dan upaya menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas khususnya di wilayah Bangka Belitung

Pesantren dan Perubahan Paradigma Pendidikan di Era Global

Tantangan global dan globalisasi yang terus menemukan momentumnya sejak akhir milenium lalu, jelas jauh lebih kompleks daripada tantangan-tantangan yang pernah dihadapi lembaga pendidikan Islam di masa silam. Kompleksitas tantangan itu menjadi lebih rumit lagi, ketika kita harus mengakui, bahwa secara internal lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya masih menghadapi berbagai masalah yang masih belum terselesaikan sampai sekarang ini.

Menurut Azra, tantangan-tantangan dan masalah-masalah internal pendidikan Islam pasca modernisasi dan tantangan globalisasi pada hari ini dan masa depan, secara umum adalah sebagai berikut: **Pertama**, jenis pendidikan yang dipilih dan dilaksanakan. Dengan terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dan politik pendidikan sejak tahun 1970an dan peluang-peluang baru seperti diisyaratkan dalam paradigma baru pendidikan nasional, kini lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki peluang dan sekaligus tantangan berkenaan dengan jenis pendidikan yang dapat dipilih dan diselenggarakan, yang setidaknya-tidaknya kini menyediakan empat pilihan: (1). Pendidikan yang berpusat pada *tafaqquh fi al-din*, seperti yang ada dalam tradisi pesantren pada masa pra-modernisasi (pesantren *salafiyah*), dengan kurikulum yang hampir sepenuhnya ilmu agama. Di tengah arus modernisasi pesantren belakangan terdapat kecenderungan sejumlah pesantren untuk mempertahankan atau bahkan kembali kepada karakter Salafiyahnya. (2). Pendidikan madrasah yang mengikuti kurikulum Diknas dan Depag. Madrasah semula merupakan “pendidikan agama plus umum”, tetapi dengan ekuivalensi seperti digariskan UUSPN 1989 adalah “sekolah umum berciri agama”. (3). Sekolah Islam “plus” atau “unggulan” yang mengikuti kurikulum Diknas, yang pada dasarnya adalah “pendidikan umum plus

agama”.(4).Pendidikan ketrampilan (*vocational training*), apakah mengikuti model “STM” atau MA/SMU ketrampilan.¹²

Keempat jenis pilihan ini dapat dilaksanakan satu lembaga pendidikan Islam tertentu, atau sebagian besar atau secara keseluruhan dalam satu kelembagaan pesantren tertentu (pesantren menjadi semacam “*holding company*”). Keempat pilihan ini secara implisit mengakomodasi hampir keseluruhan harapan masyarakat secara sekaligus kepada pendidikan Islam. Harapan pertama dan utama adalah agar lembaga-lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan tetap menjalankan peran sangat krusialnya dalam tiga hal pokok: *Pertama*, transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*). *Kedua*, pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*). *Ketiga*, reproduksi (calon-calon) ulama (*reproduction of `ulama`*). Harapan *kedua*—yang tidak berarti kurang penting—adalah agar para peserta didik tidak hanya mengetahui ilmu agama, tetapi juga ilmu umum—atau sebaliknya tidak hanya menguasai pengetahuan umum, tetapi juga unggul dalam ilmu agama—dan dengan demikian, dapat melakukan mobilitas pendidikan. Dan harapan *ketiga*, agar para anak didik memiliki ketrampilan, keahlian atau *lifeskills*—khususnya dalam bidang-bidang sains dan teknologi yang menjadi karakter dan ciri masa globalisasi—yang pada gilirannya membuat mereka memiliki dasar-dasar “*competitive advantage*” dalam lapangan kerja, sebagaimana dituntut di alam globalisasi.¹³

Kedua, berkaitan dengan masalah pertama di atas adalah persoalan identitas diri lembaga pendidikan Islam tertentu. Pada satu segi, pengakuan atas dan penyeteraan pendidikan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam telah membuka berbagai peluang bagi penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan

¹²Azyumardi Azra, *Paradigma baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Logos, 1999 hal.35-38.

¹³Azra, *Ibid.*, hal. 38-40 cf Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Tantangan Milenium Baru, khususnya, “Kebangkitan Sekolah Elite Muslim: Pola Baru “Santrinisasi”*. Jakarta: Logos, 2000, hal. 40-44.

pendidikan Islam. Tetapi pengambilan pilihan-pilihan tadi sangat bisa jadi dapat mengorbankan identitas pendidikan Islam itu sendiri sebagaimana telah terpatri di dalam masyarakat. Di sini terjadi “perbenturan” antara “*social expectations*” dengan “*academic expectations*” yang disinggung di atas. Dan hal ini, terlihat khususnya di pesantren. Keterlibatan pesantren dalam program-program non-kependidikan seperti pengembangan pesantren sebagai pusat koperasi, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi pedesaan, pusat pengembangan pertanian dan peternakan, pusat penyelamatan lingkungan hidup, pusat pengembangan HAM dan demokrasi, dan sebagainya juga dapat mengaburkan identitas pesantren.

Lebih jauh, paradigma baru pendidikan nasional juga sangat menekankan kenyataan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya merupakan “pendidikan berbasis masyarakat” (*community-based education*) selama berabad-abad. Pada satu segi, pengakuan ini merupakan perkembangan yang positif, khususnya menyangkut eksistensi pendidikan Islam itu sendiri. Tetapi, pada segi lain, pengakuan itu secara implisit menuntut peran lebih besar masyarakat dalam pendidikan Islam. Masyarakat kini dituntut tidak hanya mendirikan bangunan fisik dan perangkat-perangkat pokok lembaga pendidikan Islam, tetapi lebih-lebih lagi dalam mengembangkannya menjadi pendidikan yang berkualitas (*quality education*) untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki—setidak-tidaknya—dasar-dasar—“keunggulan kompetitif tersebut. Di sini, masyarakat pendukung pendidikan Islam diharapkan dapat menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung yang lebih memadai bagi terselenggaranya pendidikan yang mampu mendorong penanaman dasar-dasar keunggulan kompetitif tersebut.

Ketiga, penguatan kelembagaan dan manajemen. Perubahan-perubahan kebijakan pendidikan nasional—misalnya yang menekankan pada peran lembaga pendidikan Islam sebagai “*community-based education*”—dan tantangan-tantangan global mengharuskan lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat dan memberdayakan kelembagaannya. UU Yayasan yang baru dan

juga UUD BHP menghendaki lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk meninjau dan merumuskan kembali kelembagaannya dan hubungannya dengan para pelaksana kependidikan; madrasah dan/atau sekolah. Kelembagaan pendidikan Islam haruslah bertitiktolak pada prinsip-prinsip kemandirian (otonom), profesionalitas, akuntabilitas dan kredibilitas.

Dalam mewujudkan *quality education*, yayasan (atau Badan Hukum Pendidikan atau bahkan PT) yang menjadi pemilik lembaga-lembaga pendidikan seyogyanya memberikan ruang gerak lebih besar kepada para pelaksana pendidikan, khususnya kepala madrasah atau kepala sekolah Islam agar: Pertama, dapat mengorganisasi dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk memberikan dukungan yang memadai bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang maksimal, bahan pengajaran yang cukup, dan pemeliharaan fasilitas yang baik; kedua, dapat berkomunikasi secara teratur dengan pemilik lembaga (dan/atau yayasan), guru, staf, orangtua, siswa, masyarakat, dan pemerintah setempat.

Selanjutnya, madrasah, pesantren atau lembaga pendidikan Islam umumnya sudah waktunya dikelola dengan manajemen moderen sehingga pendidikan yang diselenggarakannya dapat lebih efisien dan efektif. Prinsip-prinsip manajemen moderen seperti “*total quality management*” (TQM) atau “*corporate good governance*” yang sudah mulai diterapkan pada sementara lembaga-lembaga pendidikan lain, agaknya dapat pula mulai dikaji di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Islam.¹⁴

Menurut Mastuhu bahwa beberapa dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran yang di dunia pesantren. Beberapa indikator pergeseran yang dialami oleh pesantren antara lain:

¹⁴Azra, *Ibid.*, hal. 38-40 cf Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Tantangan Milenium Baru, khususnya, “Kebangkitan Sekolah Elite Muslim: Pola Baru “Santrinisasi”*. Jakarta: Logos, 2000, hal. 40-44.

1. Kiai bukan lagi satu-satunya sumber belajar santri. Dengan beberapa buku terjemah dari sebagian kitab kuning dan buku-buku asli berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan pemikiran keislaman modern memasuki pesantren maka menjadi alternative sumber pengetahuan bagi santri. Apalagi dengan dinamika teknologi informasi yang sangat cepat maka santri dengan mudah dapat mengakses informasi dan ilmu pengetahuan dengan cukup membuka internet melalui hand phone atau warnet.
2. Dewasa ini hampir seluruh pesantren menyelenggarakan jenis pendidikan klasikal formal. Keterbukaan pesantren tampak pada adanya improvisasi terhadap sistem pendidikannya. Sebagian besar pesantren telah mengadopsi pendidikan klasikal dengan kurikulum yang sebelumnya dianggap sekuler sejak dari RA/TK, MI/SDI, MTs./SMPI, MA/SMU. Bahkan beberapa pesantren telah membuka Perguruan Tinggi Agama Islam, bahkan Perguruan Tinggi Umum.
3. Seiring dengan pergeseran pola tersebut, santri membutuhkan ijazah yang dikeluarkan lembaga pendidikan formal baik yang ada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional dengan penguasaan bidang keterampilan atau keahlian yang jelas yang dapat mengantarkannya untuk memasuki sektor-sektor lapangan pekerjaan kehidupan saat ini dan seterusnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka di kalangan santri terdapat kecenderungan yang semakin kuat untuk mempelajari sains dan teknologi pada lembaga-lembaga pendidikan formal, baik di madrasah atau sekolah umum untuk memperoleh keahlian dan atau keterampilan yang dimaksud, tetapi mereka juga ingin tetap belajar di pesantren untuk mendalami ilmu agama.
5. Belajar dengan dipungut biaya sudah memasuki dunia pesantren. Saat ini dalam kehidupan manusia sulit dijumpai yang gratis. Maka ustadustad yang membantu proses pembelajaran di pesantren harus

diberi honorarium atas jerih payahnya. Karena mereka juga punya beban tanggung jawab menafkahi anak-anak dan keluarganya.

6. Sejak dikenalnya model madrasah dengan sistem klasikal dan materi pelajaran ilmu pengetahuan umum maka sejak itu pula pesantren telah memasuki sistem pendidikan umum dan akhirnya secara resmi telah menjadi sub sistem pendidikan nasional walaupun pendidikan di pesantren diakui masih sarat nilai Islami.¹⁵

Sebagian orang menduga, umat Islam gagal memasuki era modernisasi karena tidak memiliki semacam etika yang menunjang ideologi modernitas. Bahkan tidak diragukan lagi sentuhan modernisasi pada sebagian pondok pesantren mengakibatkan santri-santrinya menjadi *urban oriented*. Santri-santri mulai tergeser bahkan nyaris kehilangan identitas dirinya. Tidak diragukan lagi bahwa umat Islam sesuai dengan misinya memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif menyelamatkan peradaban manusia. Tanggung jawab untuk menegakkan kehidupan yang bermoral yang transidental berdasarkan hukum-hukum Allah dengan solidaritas kemanusiaan dan persahabatan universal.

Dengan tanggung jawab ini pesantren sebagai bagian dari institusi pendidikan berbasis agama tidak perlu ikut latah dan gegabah membongkar pasang kurikulum yang sudah mapan, dengan cara mencari terobosan baru sebagai upaya merespon modernisasi. Pesantren memasuki gerbang era modernisasi perlu sikap ketegasan diri dengan mencari solusi terhadap pengaruh dan dampak gelombang modernisasi globalisasi itu sendiri.¹⁶

Oleh sebab itu diperlukan adanya *dekontruksi* paradigma pesantren, dikarenakan adanya tuntutan zaman, dimana dunia pesantren dituntut untuk mampu menyelaraskan dan mengombinasikan antara nilai-nilai tradisional pesantren dengan modernitas perkembangan zaman. Dengan pendekatan pola pikir *inklusivistik*, egaliter dan semangat untuk memperbaiki diri dalam menterjemahkan nilai-nilai *kompromi* kebudayaan tradisional dengan modern, disinilah letak karakter khas *indegenousitas* pesantren sebagai lembaga

¹⁵Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta, INIS, 1994) hal. 66-67

¹⁶Hamdan Farchan Syarifuddin., *Titik Tengkar Pesantren*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005 hal. 21

pendidikan Islam di Indonesia. Diharapkan kedepan – pembangunan- dunia pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua mampu membuka dan mempertahankan wacana diskursus peradaban dunia di Indonesia pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya.¹⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika sistem pendidikan pesantren adalah pergeseran, perubahan dan perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kualitas dari sistem pendidikan pesantren tergantung pada kualitas kiai sebagai aktor sosial, mediator, dinamisator, katalisator, motivator maupun sebagai kekuatan sebuah pesantren dengan kedalaman ilmu dan wawasannya. Diharapkan nantinya pesantren mampu berperan dan mengantisipasi serta menjawab problematika masyarakat dan keumatan pada setiap aspek sesuai dengan bidang kebutuhan masyarakat. Pesantren mampu menjadi pusat peradaban muslim yang senantiasa mengajarkan dan menyuarakan *inklusifisme* nilai-nilai ajaran Islam sebagai *rahmatan lil-alamiin*.¹⁸

Pengembangan Kultur Pesantren di Bangka Belitung :SebuahPotret

Secara umum eksistensi pondok pesantren di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sisi bentuk, kultur dan tradisinya tidak jauh berbeda dengan pondok-pondok pesantren yang lain di nusantara ini, namun tentu saja ada perbedaan dari sisi tradisi dan kulturnya dengan pondok pesantren di Jawa yang sudah lebih dahulu tumbuh dan berkembang dengan mapan. Dalam pengembangan kultur dengan segala aspeknyapun secara lokalitas tentu saja berbeda dengan pengembangan kultur pondok pesantren di Jawa dan wilayah lainnya. Tentu saja faktor lokalitas dalam pengembangan kultur pondok pesantren sangat penting disamping faktor-faktor lain yang berkaitan dengannya.

Secara umum sebuah pesantren dipahami sebagai komunitas yang terdapat didalamnya ;

[1] Kiai, yang mengajar dan mendidik;

¹⁷Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren* Jakarta, INIS, 1994) hal. 66-67

¹⁸Ridwan Natsir., *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Peradaban*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005 hal.7

- [2] Santri, yang belajar dari kiai ;
- [3] Masjid, tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, shalat berjamaah dan sebagainya ;
- [4] Pondok/ asrama, tempat tinggal para santri, atau selama ini dikenal dengan ciri khusus dan ciri umum.
- [5] Pembelajaran Kitab kuning.¹⁹

Dalam perjalanan sejarah pesantren dilihat dari segi pertumbuhan sarana dan prasarana pendukungnya mengalami dinamika perkembangan yang pada akhirnya berkembang pada kemampuan pesantren dalam menjawab tantangan zaman berupa; pengelolaan manajemen secara profesional, maka ada klasifikasi umum pesantren berupa pondok pesantren *salaf*, semi berkembang, berkembang dan pesantren *khalaf* (modern).²⁰

Secara umum keberadaan pondok pesantren di wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung berdasarkan klasifikasinya terdiri dari model pondok pesantren *salaf* (tradisional) dan *khalaf* (moderen), tentu saja dengan varian dan klasifikasi yang berbeda dengan pondok pesantren di Jawa. Pertumbuhan pondok pesantren di Bangka Belitung memang agak lamban jika dibandingkan dengan pertumbuhan di wilayah Indonesia lainnya. Hingga tahun 2016 pertumbuhan pondok pesantren di wilayah Bangka Belitung berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh bagian PAKIS (Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam) Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya berjumlah 44 buah dengan jumlah santri sebesar 7437 santri. Jumlah ini tersebar di 7 kabupaten dan kota, yaitu di Kabupaten Bangka 10 buah, Bangka Barat 4 buah, Bangka

¹⁹Ciri-ciri umum ditandai dengan adanya: 1] Kiai (*abuya, encik, ajengan* dan tuan guru), sebagai figur sentral yang biasanya juga sebagai pemilik pondok pesantren, [2] Asrama, sebagai tempat tinggal santri, [3] Adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajian (*weton, bandongan dan sorogan*). Sedangkan ciri khususnya ditandai dengan adanya sifat yang karismatik dan suasana kehidupan keagamaan yang mendalam. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 18.

²⁰Menurut penelitian Arifin (1993) di dunia pesantren telah terjadi banyak pergeseran gaya kepemimpinan dan manajemen secara besar-besaran dalam rangka adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Masih menurut Arifin (1993), alam pikiran pesantren yang dibentuk oleh komunitas agraris perlahan-lahan tapi pasti bergeser kedalam alam pikiran industri, dimana aspek manajemen dan profesionalitas yang diabaikan dalam pikiran agraris mendadak menjadi penting dalam proses pertumbuhan pesantren. Lihat Arifin Imron, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng* (Malang: Kalimasahada Press, 1993), hlm. 6-10

Selatan 6 buah, Bangka Tengah 9 buah, Belitung Timur hanya 1 buah, Belitung 6 buah dan kota Pangkalpinang 6 buah pondok pesantren.²¹

Eksistensi pondok pesantren di wilayah Bangka Belitung juga hampir sama dengan di wilayah lainnya, terutama dari sisi pengelolaan dan manajemen pondok. Akan tetapi, keberadaan Kiai dan pengasuh ponpes di Babel tentu saja tidak sama persis dengan keberadaan kiai dan pengasuh di wilayah lain, khususnya di Jawa dengan tradisinya yang sudah eksis dan mapan. Kedudukan para kiai dipesantren-pesantren bukanlah sekedar memberikan pelajaran, pembimbing keagamaan bagi santri-santrinya akan tetapi juga berperan sebagai tokoh non-formal yang ucapan-ucapan, komunikasi dan leadershipnya sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kemunduran pesantren. Pendek kata para kiai berperan sebagai sosok, model atau contoh yang baik (*uswatun hasanah*) tidak saja bagi santri tetapi juga bagi seluruh komunitas di wilayah pesantren dan sekitarnya atau bahkan lebih luas dari itu.

Sosiolog Clifford Geertz mengemukakan bahwa kiai selain berperan sebagai tokoh masyarakat yang memberikan pelayanan sosial, mereka juga berperan sebagai mediator atas arus informasi yang masuk ke lingkungan santri. Para kiai inilah yang mentransformasikan nilai-nilai yang mereka anggap baik dan berguna kepada santri dan komunitas dilingkungan mereka dan menolak atau membuang nilai-nilai yang dianggap kurang/tidak baik bagi mereka.²²

Kultur dan karakteristik masyarakat Bangka Belitung yang secara sosiologis bersifat cair dan terbuka dan egalitarian tentu saja membuat kiai-kiai pondok di wilayah ini harus mampu mengimbangi dan mengayomi santri dan masyarakat sekitarnya dengan tetap menjaga fungsi dan kedudukan kiai sebagai pimpinan atau orang yang dihormati di pondok pesantren. Kultur masyarakat yang bersifat terbuka dan cenderung menghindari sikap *ewuh pakewuh* ditambah

²¹Data tahun 2016 bidang PAKIS (Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

²²Geertz, dalam *The Javanese Kyai: The Changing Role of a Cultural Broker* , dalam *Comparative Studies in Society and History*, vol. 2, No. 2 yang menempatkan kiai sebagai makelar budaya (*cultural-broker*), dalam hal ini Geertz beranggapan bahwa kiai sebagai figur penyaring berbagai informasi yang datang dari luar yang masuk pada kehidupan kaum santri dengan mengambil yang berguna, membuang yang tidak bermanfaat.

dengan minimnya tradisi “birokrasi kerajaan” (berupa ketaatan dan kepatuhan kepada orang yang dihormati, termasuk kiai) di wilayah ini menjadikan pimpinan pondok dan kiai harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan semua komunitas pondok dan warga sekitar, sehingga seorang kiai tidak kehilangan kharisma dan jiwa kepemimpinannya.

Peran seorang kiai sebagai mediator akan macet, manakala arus informasi yang demikian keras masuk kedalam kehidupan masyarakat dan posisi kiai tidak dapat lagi membendung arus budaya atau informasi yang masuk. Dari kemacetan fungsional peran kiai timbul adanya kesenjangan budaya (*cultural lag*) antara kiai dengan komunitas masyarakatnya, dan tidak jarang kiai ditinggalkan oleh penganutnya atau santrinya.²³

Menurut Horikhosi (1987) sebagaimana dikutip Nur Syam (2005) tentang kiai dan perubahan sosial melalui apa yang disebutnya peran mediator, Kiai dapat menjadi penghubung diantara kepentingan atasan dan bawahan, karena kiai memiliki kemampuan untuk memahami dunia kaum bawahan dan dunia kaum atasan. Kiai ternyata memiliki kemampuan individual untuk melakukan perubahan sosial terhadap pandangan hidup tradisional kearah pandangan hidup modern dengan watak emansipatoris. Kiai dengan kharismanya ternyata dapat menjadi mediator di tengah kesulitan atau masalah yang dihadapi masyarakat atau komunitas pondok.²⁴

Peran-peran inilah yang hingga saat ini, hemat penulis, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi para pimpinan pondok di wilayah Bangka Belitung, dalam upaya mengembangkan peran pondok pesantren di daerah,

²³Abdurrahman Wahid., “Kata Pengantar” dalam Hiriko Horikoshi., *op.cit.* hal.xvi-xvii

²⁴Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Penerbit LKIS, 2005), hlm. 28. Kiai dengan karismanya ternyata dapat menjadi mediator ditengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakatkalah itu, sebagai akibat kasus pemberontakan diwilayah Cipari (Jawa Barat). Dalam posisi sulit,kiai justru berperan kreatif dengan menawarkan perubahan didalam menatap kenyataan sosialdisekelilingnya. Selanjutnya dalam penelitian Turmudi (1997), perubahan peran kiai bisa saja terjadi didalam menghadapi ummat/masyarakat.Peran kiai yang semula sentral kemudianmemudar, terutama dalam bidang sosial-politik. Jika dulunya kiai berperan didalam seluruhkehidupan masyarakat maka seirama dengan perubahan zaman, peran itu berubah menjadi untukurusan *ukhrawi* saja. Banyak terjadi perbedaan afiliasi politik antara kiai dengan penganutnya. Jadikiai tidak sakral dan dominan lagi dalam menentukan perilaku politik masyarakat.

terutama komunikasi dengan arus atas yaitu kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sejauh ini komunikasi dengan arus bawah sudah berlangsung efektif, karena sebagian pimpinan dan kiai pondok di wilayah Bangka Belitung adalah pengurus ormas Islam dan tokoh masyarakat di wilayahnya.

Peranan para kiai dan ulama sebagai tokoh masyarakat dapat dilihat, misalnya dari serangkaian upaya-upaya mereka untuk menyukseskan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Para kiai dan ulama berperan sebagai penerjemah dan komunikator yang bisa menterjemahkan ide-ide, gagasan – gagasan dan program-program pembangunan ke dalam bahasa agama yang mudah dimengerti dan kemudian mereka sampaikan kepada komunitas yang mereka pimpin. Dengan cara ini, para kiai dan ulama sekaligus berperan pula dalam memobilisasi masyarakat Muslim lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam program-program yang dilakukan pemerintah. Fatwa-fatwa agama yang mereka keluarkan telah ikut melegitimasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, yang atas dasar itu masyarakat Muslim akan dapat menerima kebijakan dan program pembangunan yang diagendakan oleh pemerintah. Hal ini semakin mempertegas jelas peran kiai dan ulama dalam proses transformasi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan. Dalam alam pembangunan dewasa ini, peran pesantren pun tak dapat diabaikan dan dilihat sebelah mata.

Dilihat dari perspektif transformasi sosial budaya, pesantren berperan sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of modernization* (agen pembaharuan) Hal ini dikarenakan pesantren sebagai manifestasi dari nilai-nilai ajaran Islam mengatur bukan hanya amalan-amalan peribadatan, apalagi sekedar hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga perilaku orang dalam berhubungan dengan sesama manusia dan dunianya.²⁵

²⁵Bakhtiar Effendi, “*Nilai Kaum Santri* ” dalam Dawam Rahardjo, “ *Pergulatan Dunia Pesantren* ” (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 50-51. Hal tidak lain karena peran tradisional – sebuah- pesantren yang kerap diidentifikasi memiliki peran penting dalam masyarakat: 1) sebagai pusat berlangsungnya ilmu-ilmu Islam tradisional (*transmission of Islamic knowledge*); 2) sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional (*maintenance of Islamic tradition*); 3) sebagai pusat reproduksi ulama (*reproduction of ulama*).

Sebagai lembaga utama dalam pembentukan watak bangsa, pondok pesantren, termasuk di wilayah Bangka Belitung memiliki peluang untuk mengembangkan diri dalam membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Tidak hanya itu, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atas peran serta masyarakat, telah mendapatkan legitimasi dalam undang-undang Sisdiknas.

Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat pada Pasal 8 menegaskan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistensi dan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, *vokasi*, keagamaan, dan khusus. Pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang memang selama ini *concern* di bidang keagamaan.²⁶

²⁶Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan:

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis. Lebih jauh lagi, saat ini pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan keagamaan semata. Namun, dalam perkembangannya ternyata banyak juga pesantren yang berfungsi sebagai sarana pendidikan nonformal, dimana para santrinya dibimbing dan dididik untuk memiliki skill dan keterampilan atau kecakapan hidup sesuai dengan bakat para santrinya.

Ketentuan mengenai lembaga pendidikan nonformal ini termuat dalam Pasal 26 yang menegaskan:

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dengan peluang pengembangan kultur pesantren yang mendapat legitimasi undang-undang sistem pendidikan nasional seperti di atas, seyogyanya pesantren-pesantren yang ada di wilayah Bangka Belitung melalui para kiai, stake-holder dan pengelolanya mampu mengembangkan diri melalui potensi dan kekuatan yang dimilikinya untuk menjadi lembaga pendidikan yang alternative bagi pilihan masyarakat baik dari sisi *indegenuousitas* pengembangan kurikulumnya maupun manajemen pengelolaan dan daya saingnya dengan lembaga pendidikan lainnya.

Omar Hamalik (1990:56) sebagaimana dikutip Abdullah Idi (1999) mengungkapkan perlunya pemikiran-pemikiran yang inovatif dalam aspek kurikulum, mengingat masyarakat yang selalu berubah maka kurikulum pun akan selalu berubah. Berdasarkan pemahamannya, kurikulum dapat dipandang sebagai kurikulum tradisional dan kurikulum secara modern. Karena pesantren mampu eksis hingga saat ini maka pesantren tentu memiliki kelebihan- kelebihan tersendiri dalam mengolah kurikulum tersebut.²⁷ Untuk semakin memajukan pendidikan pesantren sesuai amanat UU No. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, eksistensi dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan harus makin ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan harus bersungguh-sungguh memberikan ruang dan

-
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
 - (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 - (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
 - (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

²⁷Lihat Abdullah Idi., *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Cet .Jakarta:

peran yang lebih luas untuk merevitalisasi dan membangun modernisasi dunia pesantren.²⁸

Para kiai dan pimpinan pondok di wilayah Bangka Belitung harus mampu menangkap peluang sekaligus hak konstitusional pendidikan ini dengan melakukan komunikasi yang intens dengan para penanggung jawab dari pihak pemerintah khususnya di Kementerian Agama di wilayahnya masing-masing. Disinilah peran dan fungsi kementerian Agama melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung cq. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan (PAKIS) dalam mendampingi dan memberikan advokasi kepada pondok-pondok pesantren yang menjadi wilayah binaannya untuk terus kreatif dan inovatif baik dari aspek penganggaran dan moneteringnya, maupun manajemen dan pengembangan jaringan atau networkingnya. Dari sisi demografi kependudukan kepulauan Bangka Belitung masih sangat sedikit hanya berjumlah 1,3 juta jiwa, dan jumlah populasi penduduk muslim hanya 78 persen.²⁹ Selain itu jumlah lembaga pendidikan di luar pondok pesantren tidak termasuk madrasah,

²⁸Pendidikan di Indonesia difahami sebagai *“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”*. (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, No.1. Sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya. Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, termasuk dunia pesantren. Pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan dikembangkan. Proses pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah diupayakan pemerintah. Proses pengembangan dunia pesantren yang selain menjadi tanggung jawab internal pesantren, juga harus didukung oleh perhatian yang serius dari proses pembangunan pemerintah. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta pesantren dalam proses pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Terlebih, dalam kondisi yang tengah mengalami krisis (degradasi) moral. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. Sehingga, pembangunan tidak menjadi hampa melainkan lebih bernilai dan bermakna. Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Karena sifat mandiri itu, pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena itu, pesantren tidak mudah disusupi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

²⁹Badan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016, Bab II Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama. Hal.5

cukup banyak dan ini tentu saja menjadi kompetitor yang harus diperhitungkan oleh kalangan pondok pesantren di wilayah ini. Tentu saja dengan jumlah penduduk yang sedikit dan jumlah lembaga pendidikan umum yang cukup banyak kreasi, inovasi dan pengembangan kultur pondok pesantren di wilayah Bangka Belitung harus mampu mengcover berbagai arus perubahan dan kebutuhan masyarakat dari sisi pendidikan keagamaan yang khas di wilayah ini. Bukan hanya inovasi kurikulum, manajemen pengelolaan, dan pengembangan networking saja yang harus diperhatikan, tetapi banyak aspek lain yang harus menjadi fokus pengembangan pondok pesantren di wilayah ini. Misalnya bagaimana kiai dan pengajar di pondok pesantren di wilayah Bangka Belitung membuat program unggulan yang diminati masyarakat, terutama penguasaan kitab kuning yang mumpuni yang harus dikuasai oleh para santri. Hampir semua pesantren di wilayah ini belum menjadikan kemampuan penguasaan kitab kuning sebagai program unggulan. Masyarakat di wilayah Babel dewasa ini membutuhkan para alumni ponpes yang mampu menerjemahkan memahami dan menjelaskan berbagai masalah keagamaan yang memiliki korelasi dengan kehidupan moderen, namun tidak mereka dapatkan kepuasan pemahaman tersebut dari alumni madrasah dan perguruan tinggi Islam yang kurang mampu memahami kitab kuning dengan baik. Penguasaan kitab kuning yang tentu saja sumbernya berbahasa Arab dengan kajian-kajian moderen dan kontemporer adalah program unggulan yang harus dimiliki oleh ponpes di wilayah Bangka Belitung. Inilah sesungguhnya kultur yang harus dipertahankan sekaligus dikombinasikan dengan berbagai perkembangan terbaru dunia pendidikan di era global ini, sehingga pesantren tidak akan pernah mati suri, tetapi tetap eksis bertahan dalam keadaan apapun dan tantangan apapun.

Tentu saja pembentukan karakter dan kultur pondok pesantren di wilayah Bangka Belitung memanglah tidak mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh para kiai, pimpinan dan pengelola pondok di wilayah ini. Perbedaan karakter wilayah, budaya masyarakat dan dukungan birokrasi pemerintah baik pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta partisipasi masyarakat merupakan aspek-aspek penting yang harus dicatat dan

tentu saja pada akhirnya, para kiai dan pengelola pondoklah yang lebih memahami apa yang harus dilakukan dalam membawa ke arah mana pondok pesantrennya akan ditujukan. Semoga pondok pesantren di Babel semakin baik dan berkualitas. Wa Allah A'lam bi Al-Shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi., *Paradigma baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Logos, 1999
- Azra, Azyumardi., *Pendidikan Islam: Tradisi dan Tantangan Milenium Baru, khususnya, "Kebangkitan Sekolah Elite Muslim: Pola Baru "Santrinisasi"*. Jakarta: Logos, 2000,
- Azra, Azyumardi., *Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.1999.
- Bruinessen, Martin Van., *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung, Mizan, 1996
- Burbules, N. & B. Torres (eds.), 2001, *Globalization and Educational Policy*, New York: Routledge
- Clifford Geertz., *The Javanese Kyai: The Changing Role of Cultural Broker* dalam *Comparative Studies in Society and History* vol.2 no.2 Januari 1960 hal.75
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Effendi, Bakhtiar, "Nilai Kaum Santri " dalam Dawam Rahardjo, " *Pergulatan Dunia Pesantren* " (Jakarta: P3M, 1985
- Farchan Syarifuddin, Hamdan., *Titik Tengkar Pesantren*.Yogjakarta: Pilar Media, 2005
- Green, Andy., 1997, *Education, Globalization and the Nation State*, London: Macmillan.
- Idi, Abdullah., *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Cet .Jakarta: Gaya Media, 1999
- Haedari, M.Amin (ed)., *Dekonstruksi Paradigma Pesantren dan Peradaban islam*. Cet.1.Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Diklat, 2011.
- Haedari, Amin dkk, *Panorama, Pesantren Dalam Cakrawala Modern*. Jakarta: Diva Pustaka, 2004

- Ismail, Faisal., *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Analisa dan Analisa Historis*. Cet keempat. Jakarta: Mitra Cendikia, 2004
- Imron, Arifin., *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng* (Malang: Kalimasahada Press, 1993),
- Junaidi, Mahbub., *Kolom Demi Kolom*. Jakarta: CV. H.Masagung, 1989
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta, INIS, 1994) hal. 66-67
- Muzadi, Hasyim., *Pesantren Tantangan Modernisasi dalam Hafidz “Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernisasi”* Jurnal Kariman vol.1 nomor 01 tahun 2013 hal,47.
- Natsir, Ridwan., *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Peradaban*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Raharjo, Dawam., *Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3M, 1985
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren: Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1986 hal.22
- Syam, Nur ., *Islam Pesisir*. Yogyakarta: Penerbit LKIS, 2005